JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA BANYU TAJUN PANGKALAN DAN SUNGAI PANDAN HULU)

Muhammad Lotvi[1], Selamat Riadi[2], Gusti Muhammad Hidayatullah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: lotvisangkakala027@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan sebagai landasan hukum pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Desa Sungai Pandan Hulu masih ditemukan berbagai persoalan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan, terbatasnya sarana pemilahan sampah, serta pengangkutan sampah yang tidak berjalan rutin sehingga menimbulkan penumpukan dan pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposive sampling, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan uji kredibilitas berupa perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, penggunaan bahan referensi, dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berdasarkan empat variabel Edward III berjalan cukup baik: variabel komunikasi pada indikator informasi tergolong cukup baik dan koordinasi sudah baik; variabel sumber daya pada indikator fasilitas masih terbatas sedangkan kinerja cukup baik; variabel disposisi pada indikator motivasi cukup baik meski partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan; dan variabel struktur birokrasi menunjukkan bahwa SOP tertulis belum sepenuhnya tersedia sementara pengontrolan tergolong cukup baik. Faktor pendukung utama adalah adanya kebijakan pemerintah dan koordinasi antarpihak, sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas tempat sampah terpilah, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi menyeluruh, penyusunan SOP tertulis, penambahan anggaran fasilitas persampahan, serta pelibatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Lingkungan Hidup (DISPERKIM LH) dalam pembinaan masyarakat dan petugas kebersihan.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, peraturan daerah.

ABSTRACT

Regional Regulation Number 16 of 2013 concerning Waste Management was established as the legal basis for waste management in Hulu Sungai Utara Regency, yet Banyu Tajun Pangkalan Village and Sungai Pandan Hulu Village still face a number of problems, including limited public understanding of the regulation, inadequate waste-sorting facilities, and irregular waste collection that causes accumulation and environmental pollution. This study aims to examine the implementation of Regional Regulation Number 16 of 2013 concerning Waste Management in Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency, together with the factors influencing its implementation. The study employs a qualitative approach with a descriptive type. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving nine informants selected through purposive sampling, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing/verification, with credibility tests consisting of extended observation, increased persistence, triangulation, use of reference materials, and member checking. The findings show that, based on Edward III's four implementation variables, the policy has run reasonably well: the communication variable shows a fairly good information indicator and a good coordination indicator; the resources variable shows limited facilities alongside fairly good performance; the disposition variable shows fairly good motivation while community participation still needs improvement; and the bureaucratic-structure variable shows that written standard operating procedures are not yet fully in place while control is fairly good. The main supporting factor is government policy together with inter-agency coordination, while the main inhibiting factors are insufficient outreach, limited segregated-waste facilities, and low public awareness. The study recommends comprehensive outreach, written standard operating procedures, additional budget for waste facilities, and involvement of the Department of Public Housing, Settlement Areas, and Environment (DISPERKIM LH) in training the community and sanitation workers.

Keywords: *policy implementation, waste management, regional regulation*.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, yaitu sekitar 277 juta jiwa. Tingginya kepadatan penduduk memberikan tekanan terhadap lingkungan, terutama di wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi, karena semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula intensitas aktivitas manusia yang berpotensi memicu kerusakan lingkungan. Salah satu persoalan lingkungan yang cukup serius adalah sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat membahayakan kehidupan dan kenyamanan lingkungan, menjadi sumber penyakit, memicu banjir, serta merusak alam. Secara umum sampah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu organik, anorganik, dan residu, dan tidak semua jenis sampah mampu terurai secara alami.

Modernisasi industri telah mendorong tumbuhnya sektor yang menghasilkan produk berbahan dasar plastik, yang membutuhkan waktu hingga 350 tahun untuk terurai secara alami. Berdasarkan data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok, dengan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik dikelola setiap tahun dan sekitar 1,29 juta ton di antaranya berakhir mencemari lautan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 dari 202 kabupaten/kota di Indonesia mencatat jumlah timbunan sampah nasional mencapai 21,1 juta ton, sementara diperkirakan hanya sekitar 60% sampah di kota-kota besar yang dapat terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Penyelesaian persoalan sampah memerlukan intervensi aktif pemerintah melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Salah satu bentuk kebijakan di tingkat daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Kebijakan tersebut mengatur pengurangan dan penanganan sampah, mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan data tahun 2023, jumlah sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 63,41 ton per hari dengan kepadatan penduduk yang tinggi di 26 desa wilayah Kecamatan Amuntai Utara, sehingga volume sampah diperkirakan terus meningkat. Kecamatan Sungai Pandan sendiri terdiri dari 33 desa dengan jumlah penduduk 27.406

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

jiwa, dengan Desa Banyu Tajun Pangkalan berpenduduk 1.276 jiwa dan Desa Sungai Pandan Hulu berpenduduk 1.501 jiwa. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kedua desa ini menjadi krusial karena tanpa pelaksanaan yang efektif, kebijakan publik tidak akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hasil observasi awal peneliti pada kedua desa tersebut menunjukkan sedikitnya tiga permasalahan pokok. Pertama, minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013, sehingga sebagian warga masih membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai, yang menimbulkan air keruh, bau tidak sedap, dan risiko banjir pada musim hujan. Kedua, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, karena hanya tersedia satu jenis tong sampah, padahal seharusnya tersedia tempat sampah terpilah untuk kategori organik, anorganik, dan residu. Ketiga, petugas kebersihan tidak rutin mengangkut dan membersihkan sampah sehingga terjadi penumpukan dan menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2016:136) yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu, serta apa saja faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut beserta faktor penghambatnya, dengan manfaat teoretis bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan manfaat praktis sebagai masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan sampah menuju lingkungan yang bersih dan sehat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran atau uraian secara sistematis, cermat, dan faktual mengenai fenomena implementasi kebijakan yang ditemukan di lapangan, tanpa mengukur atau mengkuantifikasi data yang diperoleh. Lokasi penelitian berada di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan pertimbangan bahwa di kedua desa tersebut ditemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lain yang relevan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap sembilan orang yang dinilai paling memahami permasalahan penelitian, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Salimi, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM LH)
2	Ahmadi	Kepala Desa Banyu Tajun Pangkalan
3	Rif'ad	Kepala Desa Sungai Pandan Hulu
4	Abdul Muis	Petugas Kebersihan Desa Banyu Tajun Pangkalan
5	Gazali Rahman	Petugas Kebersihan Desa Banyu Tajun Pangkalan
6	Ahmad Yani	Petugas Kebersihan Desa Sungai Pandan Hulu
7	Ahmad Saifullah	Petugas Kebersihan Desa Sungai Pandan Hulu
8	Anita	Masyarakat Desa Banyu Tajun Pangkalan
9	Suriansyah	Masyarakat Desa Sungai Pandan Hulu

Kerangka analisis penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III (dalam Agustino, 2016:136), yang dijabarkan ke dalam empat sub-variabel beserta indikatornya, yaitu (1) komunikasi dengan indikator informasi dan koordinasi; (2) sumber daya dengan indikator fasilitas dan kinerja; (3) disposisi dengan indikator motivasi dan partisipasi; serta (4) struktur birokrasi dengan indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengontrolan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi terhadap perilaku dan kondisi lapangan, wawancara mendalam kepada informan terkait, serta dokumentasi berupa foto kegiatan, arsip, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), yaitu reduksi data (penyederhanaan dan pemilahan data yang relevan), penyajian data (penyusunan data secara sistematis agar mudah dipahami), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, penggunaan bahan referensi berupa foto dan rekaman, serta membercheck kepada pemberi data.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dari tiga belas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah 915,05 Km² yang sebagian besar berupa daratan rendah bergambut dengan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Total penduduk kabupaten ini pada tahun 2024 tercatat sebanyak 237,05 ribu jiwa. Kecamatan Sungai Pandan, tempat penelitian ini dilaksanakan, terdiri dari 33 desa dengan luas 59,92 Km². Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Desa Sungai Pandan Hulu merupakan entitas pemerintahan desa yang masing-masing terbagi menjadi empat dan enam Rukun Tetangga (RT), dengan berbagai organisasi kemasyarakatan aktif seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, dan Posyandu, yang turut berperan dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan dan kebersihan.

1. Komunikasi

a. Informasi

Hasil wawancara dengan pihak DISPERKIM LH menunjukkan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 telah dilakukan sejak lama, meskipun pelaksanaannya hanya menjangkau tingkat kecamatan dengan mengundang perwakilan desa. Kepala Desa Sungai Pandan Hulu menyampaikan bahwa penjelasan mengenai cara memilah dan mengolah sampah telah disampaikan secara berulang oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga pemahaman warga semakin baik. Namun, gambaran yang berbeda disampaikan oleh sebagian besar petugas kebersihan dan masyarakat di kedua desa, yang mengaku belum pernah mendapatkan penjelasan resmi, terstruktur, dan tertulis mengenai tata cara pengelolaan sampah yang benar, sehingga pekerjaan maupun kebiasaan mereka lebih banyak mengandalkan arahan lisan dan pengalaman otodidak. Hasil observasi memperkuat temuan ini, yakni media penyampaian informasi umumnya berupa himbauan langsung, dengan kondisi baliho atau spanduk panduan pengelolaan sampah yang sudah terpasang di Desa Sungai Pandan Hulu, tetapi belum ada di Desa Banyu Tajun Pangkalan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, indikator informasi pada kedua desa tergolong cukup baik, karena penyebaran informasi mengenai keberadaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 secara umum telah menjangkau masyarakat, tetapi belum disertai penjelasan teknis yang menyeluruh mengenai tata cara

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

pemilahan dan pengelolaan sampah, sehingga sebagian warga dan petugas kebersihan masih bekerja tanpa panduan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya selaras dengan teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), yang menegaskan bahwa informasi yang baik akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula.

b. Koordinasi

Pada indikator koordinasi, DISPERKIM LH menghimbau pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran desa guna mengaktifkan kembali bank sampah, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mengelola sampahnya. Kedua Kepala Desa menyatakan bahwa ajakan kegiatan kebersihan lingkungan disampaikan secara terbuka melalui pengumuman umum maupun pemberitahuan langsung lewat Ketua RT, dengan informasi waktu, tempat, dan tugas yang jelas. Sebagian besar petugas kebersihan dan masyarakat membenarkan bahwa mereka kerap diajak dan dilibatkan dalam kegiatan gotong royong, meskipun sebagian informan lain mengaku ajakan yang mereka terima kurang jelas atau bahkan tidak pernah sampai kepada mereka secara langsung.

Secara keseluruhan, indikator koordinasi pada kedua desa tergolong sudah baik, karena pemerintah desa telah membangun jalur komunikasi yang cukup lancar dengan kelompok sasaran kebijakan melalui Ketua RT, meskipun masih terdapat sebagian warga yang belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136) yang menekankan bahwa koordinasi yang baik antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

a. Fasilitas

Hasil wawancara dengan berbagai pihak, mulai dari DISPERKIM LH, kedua Kepala Desa, petugas kebersihan, hingga masyarakat, secara konsisten menunjukkan bahwa Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu belum memiliki tempat sampah terpilah untuk kategori organik, anorganik, dan residu. Fasilitas yang tersedia hanya berupa satu jenis tempat sampah, dengan kondisi yang di sejumlah titik sudah rusak dan tidak terawat, sehingga masyarakat maupun petugas kesulitan memisahkan jenis sampah yang harus dikelola. Keterbatasan ini menurut informan disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran desa untuk pengadaan sarana persampahan. Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

temuan tersebut, dengan ditemukannya tempat sampah berbahan semen yang justru digunakan warga untuk membakar sampah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator fasilitas pada kedua desa tergolong masih kurang baik, karena ketiadaan sarana pemilahan sampah yang memadai membuat pengelolaan sampah tidak berjalan sesuai standar. Temuan ini belum sejalan dengan teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136) yang menempatkan ketersediaan fasilitas sebagai salah satu prasyarat penting keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Kinerja

Pada indikator kinerja, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa petugas kebersihan di Desa Banyu Tajun Pangkalan secara umum telah melaksanakan tugas pengangkutan sampah dengan cukup baik, sehingga kondisi lingkungan relatif tidak mengalami penumpukan sampah. Namun, kondisi berbeda ditemukan di Desa Sungai Pandan Hulu, di mana masih terdapat titik-titik penumpukan sampah yang dikeluhkan warga karena berdampak pada kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.

Dengan demikian, indikator kinerja pada kedua desa tergolong cukup baik, meskipun pada Desa Sungai Pandan Hulu masih memerlukan perbaikan dalam hal konsistensi jadwal pengangkutan sampah. Temuan ini sejalan dengan teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136) yang menegaskan bahwa kinerja pelaksana kebijakan sangat menunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik.

3. Disposisi

a. Motivasi

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa petugas kebersihan pada kedua desa umumnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan berupaya menjaga lingkungan tetap bersih, rapi, dan nyaman, serta terbuka terhadap masukan maupun keluhan warga. Meskipun demikian, jadwal pengangkutan sampah sewaktu-waktu masih dapat tertunda akibat kendala teknis, seperti kendaraan pengangkut yang sedang dalam perbaikan. Berdasarkan temuan tersebut, indikator motivasi pada kedua desa tergolong cukup baik, karena petugas kebersihan menunjukkan komitmen kerja yang memadai, meskipun

konsistensi pelaksanaan tugas masih perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan penumpukan sampah akibat keterlambatan pengangkutan.

b. Partisipasi

Pada indikator partisipasi, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah berupaya membuang sampah pada tempatnya, tetapi sebagian lain masih membuang sampah ke sungai, terutama pada malam hari, meskipun larangan tersebut telah disosialisasikan di Desa Sungai Pandan Hulu. Rendahnya partisipasi ini dinilai berkaitan erat dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Dengan demikian, indikator partisipasi pada kedua desa tergolong cukup baik namun masih tergolong rendah dalam praktiknya, karena keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan belum merata. Temuan ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sebagaimana disarankan dalam teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), yaitu melalui kesediaan menerima informasi, mematuhi aturan, dan turut mengawasi jalannya kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hasil wawancara dengan DISPERKIM LH menunjukkan bahwa pelatihan mengenai pengelolaan sampah telah diberikan kepada desa sesuai SOP yang berlaku di tingkat dinas. Namun, di tingkat desa, Kepala Desa Banyu Tajun Pangkalan menyatakan bahwa SOP belum disusun secara rinci maupun ditetapkan secara resmi, sementara Kepala Desa Sungai Pandan Hulu menyebutkan bahwa aturan yang ada masih bersifat lisan dan belum tertulis secara resmi. Petugas kebersihan di kedua desa turut membenarkan bahwa ketentuan mengenai cara kerja, jadwal, dan tanggung jawab hanya disampaikan secara lisan oleh kepala desa, tanpa adanya panduan tertulis yang baku.

Berdasarkan temuan tersebut, indikator SOP pada kedua desa tergolong masih kurang baik, karena belum tersedianya petunjuk teknis tertulis yang mengatur tata cara, jadwal, dan pembagian tugas pengelolaan sampah secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

b. Pengontrolan

Pada indikator pengontrolan, ditemukan perbedaan kondisi antara kedua desa. Di Desa Sungai Pandan Hulu, pemerintah desa dinilai cukup aktif memberikan himbauan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

maupun teguran kepada warga yang membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai, sehingga fungsi pengawasan berjalan cukup optimal. Sebaliknya, di Desa Banyu Tajun Pangkalan, pengontrolan dinilai masih kurang baik karena minimnya himbauan maupun teguran kepada masyarakat, sehingga sebagian warga tidak merasa segan untuk membuang sampah sembarangan.

Dengan demikian, indikator pengontrolan pada Desa Sungai Pandan Hulu tergolong cukup baik, sedangkan pada Desa Banyu Tajun Pangkalan tergolong masih kurang baik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sebagai bagian dari struktur birokrasi, sebagaimana ditekankan dalam teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), belum diterapkan secara merata pada kedua desa yang diteliti.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu)

Selain menilai keempat variabel implementasi kebijakan, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 di kedua desa.

Faktor Pendukung

Pertama, keberadaan kebijakan pemerintah itu sendiri menjadi faktor pendukung utama, karena Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 memberikan landasan hukum yang jelas bagi seluruh pihak, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, dalam melaksanakan pengelolaan sampah, meskipun pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan anggaran dan kesadaran masyarakat. Kedua, koordinasi antarpihak antara DISPERKIM LH, pemerintah desa, dan masyarakat turut menjadi faktor pendukung penting, karena sinergi tersebut mampu menutupi sebagian keterbatasan fasilitas yang ada, sehingga program pengelolaan sampah tetap dapat berjalan dan mengarah pada tujuan kebijakan yang diharapkan.

Faktor Penghambat

Pertama, kurangnya sosialisasi dari pihak desa kepada masyarakat, yang menurut DISPERKIM LH disebabkan oleh keterbatasan dana sehingga sosialisasi hanya menjangkau sebagian kecil warga, sehingga banyak masyarakat belum mampu menerapkan peraturan pengelolaan sampah dengan baik. Kedua, keterbatasan fasilitas

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

tempat sampah terpilah untuk kategori organik, anorganik, dan residu, yang menjadi hambatan krusial karena mendorong kebiasaan masyarakat menyatukan seluruh jenis sampah rumah tangga dan membuangnya secara sembarangan. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, termasuk kebiasaan membuang sampah ke sungai yang sudah berlangsung lama, yang menjadi tantangan tersendiri di luar aspek kebijakan maupun fasilitas. Keempat, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis di kedua desa, sehingga tata cara, jadwal, dan pembagian tugas pengelolaan sampah masih mengandalkan arahan lisan kepala desa, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi pelaksanaan tugas di lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu, secara keseluruhan tergolong cukup baik jika ditinjau dari empat variabel implementasi kebijakan George C. Edward III (dalam Agustino, 2016:136). Pada variabel komunikasi, indikator informasi tergolong cukup baik karena penyebaran informasi mengenai keberadaan peraturan sudah menjangkau masyarakat meski belum disertai penjelasan teknis yang menyeluruh, sedangkan indikator koordinasi sudah tergolong baik karena pemerintah desa secara aktif melibatkan warga melalui Ketua RT. Pada variabel sumber daya, indikator fasilitas masih tergolong kurang baik karena ketiadaan tempat sampah terpilah, sedangkan indikator kinerja tergolong cukup baik meski Desa Sungai Pandan Hulu masih menghadapi persoalan penumpukan sampah. Pada variabel disposisi, indikator motivasi petugas kebersihan tergolong cukup baik pada kedua desa, sedangkan indikator partisipasi masyarakat tergolong cukup baik namun masih perlu ditingkatkan, khususnya di Desa Sungai Pandan Hulu. Pada variabel struktur birokrasi, indikator SOP tergolong kurang baik pada kedua desa karena belum tersedia panduan tertulis resmi, sedangkan indikator pengontrolan tergolong kurang baik di Desa Banyu Tajun Pangkalan namun cukup baik di Desa Sungai Pandan Hulu.

Faktor pendukung implementasi kebijakan ini adalah adanya kebijakan pemerintah yang memberikan landasan hukum yang jelas serta koordinasi yang terjalin antara DISPERKIM LH, pemerintah desa, petugas kebersihan, dan masyarakat. Adapun faktor penghambatnya meliputi kurangnya sosialisasi dari pihak desa, keterbatasan fasilitas

tempat sampah terpilah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, serta belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis di tingkat desa. Secara umum, upaya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kedua desa ini masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek sosialisasi, penyediaan fasilitas pemilahan sampah, dan penegakan aturan, agar tujuan kebijakan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dapat tercapai secara optimal.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa. Diharapkan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis mengenai pengelolaan sampah, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 secara menyeluruh kepada seluruh warga, mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tempat sampah terpilah (organik, anorganik, dan residu), serta mengundang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM LH) untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dan petugas kebersihan.

2. Bagi Petugas Kebersihan Desa. Diharapkan mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, menjalankan jadwal dan prosedur pengumpulan sampah secara konsisten, serta menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat dan pemerintah desa.

3. Bagi Masyarakat Desa. Diharapkan berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah desa, mengikuti pelatihan mengenai manajemen sampah yang baik dan berkelanjutan, menjaga kebersihan rumah tangga, memilah sampah sesuai jenisnya, serta tidak membuang sampah di tempat umum atau ke aliran sungai.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anonim. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta.

Anonim. (2013). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Amuntai.

Anonim. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Anonim. (2018). Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Amuntai.

Chotimah, C. (2020). Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Pantai Selatan Tulungagung. Tulungagung: Akademi Pustaka.

Deddy, M. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Dewi, K. (2022). Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Samudra Biru.

Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia, 2(2), 92-101.

Hikmah, N. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Iriawan, H. (2024). Teori Kebijakan Publik. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik. Banten: CV. AA. Rizky.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyo, U. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Jambi: Salim Media Indonesia.

Syafaruddin, H. (2021). Problematika Kesehatan dan Lingkungan di Bumi Melayu. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Tarigan, Br. (2023). Pengelolaan Sampah Kreatif. Malang: Rena Cipta Mandiri.

Tjilen, P. (2019). Kebijakan Publik. Bandung: Nusa Media.

Zahran, F. (2021). Pengertian Desa Menurut Para Ahli. Gramedia Blog. Diakses dari https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/